

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Peraturan Kawasan tanpa rokok diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai Kabupaten pertama di Yogyakarta yang menetapkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai sarana untuk meningkatkan hak masyarakat untuk mendapat udara bersih. Penempatan peraturan bupati juga termasuk salah satu usaha pemerintah daerah dalam menjalankan amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dinas lingkungan hanya menyerahkan sepenuhnya ke Dinas Sleman dan Dinas Lingkungan juga belum mempunyai kajian tentang dampak asap rokok ke lingkungan. Kantor Pemerintahan Daerah Sleman sendiri belum semua menyediakan tempat khusus merokok. Kantor Bupati Sleman sebagai pusat pemerintahan Sleman belum disediakan secara efektif terdapat tempat yang dikhususkan untuk merokok. Hal ini membuktikan jika pemerintah sendiri belum menjalankan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Titik di daerah Kawasan Tanpa Rokok sudah ada yang disediakan oleh Pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya masih sulit untuk diterapkan karena Pengawasan Dinas Kesehatan pun belum terlalu ketat. Satpol PP hanya mendampingi ketika dinas kesehatan melakukan penegakan tapi leading sektornya tetap

dinas kesehatan. Satpol PP tidak bisa memberikan sanksi bila ada yang melanggar karena semua sanksi di berikan ke dinas kesehatan, selama ini belum pernah ada penegakan Kawasan tanpa rokok.

2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok ini juga mengatur tentang sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati tersebut. Dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 ini dijelaskan bahwa bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok akan diberikan sanksi administratif yaitu: berupa teguran lisan dan teguran Penempatan kawasan tanpa rokok sebagai langkah upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan yang tercemar asap rokok. Dilihat dari data yang diperoleh dari hasil kuesioner dapat dikatakan bahwa Masyarakat Daerah Sleman sudah 60% masyarakat mengetahui tentang adanya Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Masyarakat juga sudah mengetahui tentang adanya kawasan tanpa rokok yang tersebar di Kabupaten Sleman karena presentasinya 60%. Masyarakat mengetahui informasi tersebut dari Pemerintah setempat bukan dari media massa, masyarakat pun sudah mengetahui mengenai adanya Kawasan KTR tersebut dengan sanksi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan peraturan tersebut karena menganggap sebuah rokok bukanlah suatu hal yang asing untuk beberapa orang. Tidak terlaksananya kebijakan kawasan tanpa asap rokok dengan maksimal di

Kabupaten Sleman, jelas akan menyulitkan terwujudnya keinginan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membangun kesehatan masyarakat dan lingkungan, karena implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Namun, penerapan kebijakan kawasan tanpa asap rokok yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman karena mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan kebijakan yang diberlakukan dari atas ke bawah, bukanlah sebagai model yang tepat untuk mewujudkan tujuan kebijakan secara efektif, karena kurang mendapatkan dukungan dari para pelaku kebijakan tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya masyarakat menyadari dan membantu untuk melakukan penerapan kebijakan kawasan tanpa asap rokok agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Seharusnya pemerintah melakukan Pengawasan secara berkala terkait Penerapan Kawasan Tanpa Rokok agar kebijakan ini berjalan secara efektif dan menerapkan sanksi yang mengakibatkan efek jera bagi yang melanggarnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Wahab Solichin, 2001, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Aprilani Soegiarto, 1976, *Bibliografi beranotasi tentang lingkungan laut dan pencemaran laut*, Lembaga Oceanologi Nasional, LIPI, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta
- H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, 2017, *Panduan Anti Merokok untuk Pelajar, Guru, dan Orang Tua*, Erlangga, Jakarta
- Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Kementerian Kesehatan, 2011, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, Pusat Promosi Kesehatan, Jakarta
- Koesnadi Hardjosoemantri, 1989, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

- Munadjat Danusaputro, 1978, *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nasional*, Litera, Bandung
- Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Ctk pertama, Nusameia, Bandung
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Indonesia, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Siroju Munur, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Yon Artiono Arba'i, 2015, *Aku Menolak Hukuman Mati*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta
- Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainudiin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta

Zairin Harahap, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta

Jurnal

Hasaziduhu Moho, 2019, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi: 59*, Universitas Dharmawangsa Sumatera Utara

Rizky Oktria Ramy dan Nursiti, 2018, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Merokok Di Kawasan Tanpa Rokok, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol. 2, No. 1*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Hasil Penelitian

A. Ikram Rifqi, 2017, Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Hasanuddin, Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hassanudin Makassar

Ade Resty Ambar Wati, 2017, Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Amalia Lathifah, 2018, Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Andrian Hasan, 2016, Analisis Hukum Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Mengenai Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Negeri Gorontalo, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin Makassar

Website

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, hlm 1, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 30 April 2021

Pemkab Sleman, <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, diakses pada tanggal 18 Juli 2021

Septian Deny, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4037042/asap-rokok-ikut-sumbang-polusi-udara>, diakses tanggal 23 April 2021

Tobacco Control Support Center, "*Kawasan Tanpa Rokok dan Implementasinya*", <http://tsc-indonesia.org/2012/08/kawasan-tanpa-rokok-dan-implementasinya.pdf>, diunduh pada tanggal 20 Agustus 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 20 Seri E)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)

